

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN 2019
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SUMATERA BARAT

BAB I. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Capaian Pelaksanaan Program

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 2 Urusan yaitu :urusan Ketenagakerjaan (wajib) dan urusan Ketransmigrasian (pilihan). Pada Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 40.391.092.823,58,- dengan realisasi Rp.38.505.707.032,- (95,33%), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp. 2.677.279.093,- dan realisasi sebesar Rp. 2.391.455.294,42- (89,32%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.030.895.378,- dan realisasi sebesar Rp. 1.990.718.020,- (98,02).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp. 189.580.000,- dan realisasi Rp. 186.590.000,- (98,42%)
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , dengan anggaran Rp.12.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.500.000,- (95,83%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 828.326.500,- dan realisasi sebesar Rp. 809.120.870,- (97,68%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 6.757.486.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.497.045.903,- (96,15%).
- 7) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dengan anggaran Rp. 1.805.085.200,- dan realisasi sebesar Rp. 1.990.718.020 (97,89%).
- 8) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan anggaran Rp.688.056.300,- dan realisasi sebesar Rp. 629.721.294,- (91,52%).
- 9) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp. 948.585.350,- dan realisasi sebesar Rp. 889.443.669,- (93,77%).

10) Program Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan anggaran Rp. 111.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.961.954,- (75,51%).

11) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran Rp. 192.588.000,- dan realisasi sebesar Rp. 192.438.000,- (99,92%)

12) Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus, dengan anggaran Rp. 648.386.378,- dan realisasi sebesar Rp. 643.195.964,- (99,20%).

Anggaran Dan Realisasi Program

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|--|------------------|-------------------|--------|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.677.279.093 | 2.391.455.294,42 | 89,32% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 189.580.000 | 1.990.718.020 | 98,02% |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 189.580.000 | 186.590.000 | 98,42% |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 12.000.000 | 11.500.000 | 95,83% |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 828.326.500 | 809.120.870 | 97,68% |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 6.757.486.800 | 6.497.045.903 | 96,15% |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------|
| 7 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha | 1.805.085.200 | 1.990.718.020 | 97,89% |
| 8 | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | 688.056.300 | 629.721.294 | 91,52% |
| 9 | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja | 948.585.350 | 889.443.669 | 93,77% |
| 10 | Program Pengadaan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium | 111.200.000 | 83.961.954 | 75,51% |
| 11 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 192.588.000 | 192.438.000 | 99,92% |
| 12 | Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur | 648.386.378 | 643.195.964 | 99,20% |

B. Outcome Program

Sesuai dengan target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang sudah disepakati pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 terhadap kegiatan yang dilaksanakan sudah tercapai, dan dapat dilihat pada capaian Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sbb :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Capaian |
|----|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja | Persentase serapan tenaga | 55,40% | 62,30% | 112,45% |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|------------|
| 2 | Meningkatnya Kondisi Hubungan Kerja Yang Harmonis | Persentase kasus perselisihan hubungan industrial dan norma ketenagakerjaan yang harus diselesaikan | 49,22% | 60,52% | 122,55% |
| 3 | Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 100% |
| 4 | Meningkatnya Kemandirian Transmigrasi | Indeks kemandirian kawasan transmigrasi | 70<IPK Trans<75 | 68<IPK Trans<75 | 90,66% |
| 5 | Meningkatnya Tata Kelola Organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas | BB | BB | angat baik |

C. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sumatra Barat, selain mengacu pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan juga dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan indikator kinerja daerah. Realisasi capaian pelaksanaan indikator kinerja daerah sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Table. Realisasi Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2019

| No | Indikator kinerja utama | | | Capaian |
|----|---|--------|-----------|---------|
| | | Target | Realisasi | (%) |
| 1 | Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja | | | |

| | | | | |
|---|---|----|----|-------|
| 2 | Meningkatnya kesejahteraan transmigrasi | 70 | 68 | 90,66 |
|---|---|----|----|-------|

D. Permasalahan dan Solusi

| No | Kegiatan | Permasalahan | Solusi |
|----|---|--|---|
| 1. | Pendidikan dan pelatihan keterampilan di UPTD BLK Padang Panjang | - Kekurangan tenaga instruktur | - Melibatkan instruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta yang ada di Kab/Kota tempat |
| | | -Kekurangan tenaga instruktur yang kompeten | - Akan dibentuk LSP Penguji di Provinsi Sumatera Barat. |
| 2. | Pelatihan kewirausahaan mandiri dan pelatihan motivasi berprestasi bagi usaha produktif | -Terbatasnya anggaran padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi. | -Pelaksanaan pelatihan harus didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga target kinerja tercapai. |
| 3. | Pembinaan dan monitoring perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. | Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan | -Perlu dilakukan pembinaan dan monitoring secara kontinu ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4. | <p>Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos.</p> | <p>- Pimpinan perusahaan tidak memahami hubungan industrial.</p> <p>- Sering ditemui perusahaan belum mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerja sehingga tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, hal ini kurang menyebabkan kurang tepat sasaran pembinaan mengenai khususnya hubungan industrial.</p> | <p>Kiranya kegiatan tetap dipertahankan.</p> |
|----|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>- Masih ada pimpinan/pengurus perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak.</p> <p>- Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dari sebagian pengawas ketenagakerjaan, sehingga pembinaan dan pengawasan serta pemeriksanaan yang dilakukan tidak/belum menyentuh substansi/pokok permasalahan.</p> | <p>- Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan/pengurus perusahaan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>- Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan sebagai objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimiliki dan dioperasikan di perusahaan, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan kerugian pada semua pihak.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|----|-----------------------------|--|---|
| 6. | Pemeriksaan kesehatan kerja | <p>- Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja seperti Reaction timer, Spirometer, Kit cholinestrase, timbang badan dan meteran badan, tensimeter, stopwatch, metronom.</p> <p>- Perlu diadakan pelatihan para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan.</p> | <p>- Perlunya penambahan jumlah peralatan untuk pemeriksaan kesehatan kerja sehingga dapat dilakukan pemeriksaan secara maksimal.</p> <p>- Penambahan anggaran untuk pengujian/pemeriksaan secara maksimal dan pelatihan paramedis.</p> |
|----|-----------------------------|--|---|

Permasalahan dan solusi Bidang Transmigrasi

| Kegiatan | Permasalahan | Solusi |
|-----------------|---|---|
| | <p>Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) lokasi Padang Hilalang SP.2 belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat pusat karena diindikasikan areal berada diluar RTRW Kabupaten Dharmasraya.</p> | <p>Mengadakan rapat bersama instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten tentang kepastian calon areal pembangunan permukiman transmigrasi Padang Hilalang SP.2 Kab. Dharmasraya berada diluar RTRW Kabupaten</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>□ Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tidak dapat direalisasikan karena belum klirnya permasalahan administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan perusahaan calon IPK</p> <p>Terkait usulan penetapan Kawasan</p> | <p>melaksanakan revisi RTRW oleh pihak Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>□Terkait administrasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang belum klir antara Menteri desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK, telah dibuatkan surat Gubernur Sumatera Barat ke Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kiranya agar merealisasikan Perjanjian Kerjasama dimaksud</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>- Tidak tersedianya alokasi untuk pendampingan petugas ke Kabupaten dan lokasi atas kunjungan pejabat/petugas dari Kabupaten daerah asal untuk melakukan peninjakan dalam rangka kerjasama pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>- Bangunan Transito tidak</p> | <p>- Mengusulkan ke pusat/ mengalokasikan dana pendampingan peninjakan ke kab/lokasi oleh daerah asal melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat.</p> |
| | <p>layak fungsi, akan kesulitan dalam proses penempatan Tahun Anggaran 2018, dimana Transmigran dari Daerah Asal akan diangkut dengan pesawat udara yang memerlukan fasilitas transito sebagai tempat peristirahatan sebelum menuju lokasi Padang Tarok SP.1 K</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Belum ada bangunan gedung SD dan Guru yang menetap di lokasi transmigrasi Padang Tarok SP.1 Kabupaten Sijunjung, sedangkan SD terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 KM yaitu SD Negeri 21 di Jorong Pintu Batu dan SD Negeri 06 di Jorong Muarobuan.</p> <p>Bidang Mental Spritual :- Belum ada Masjid di lokasi Transmigrasi, Masjid terdekat di Jorong Muaro Buan, kegiatan ibadah dilaksanakan di Balai Desa.</p> <p>- Bidang Kesehatan : Belum ada Pustu (Puskesmas Pembantu) di lokasi Padang tarok SP.1, adalah Poskesri Binuang Aie Putih dan Nagari Padang tarok yang jaraknya ± 11 km.</p> <p>Bidang Optimalisasi lahan. Warga Transmigran Padang Tarok Kabupaten Sijunjung-</p> | <p>Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten Sijunjung dan memfasilitasi guru, minimal memanfaatkan Balai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya ± 11 KM.</p> <p>Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan aklak dan mental anak.</p> <p>Perlu diingat belum adanya bangunan Masjid/Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga transmigrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.</p> <p>Perlu dibangun</p> |
|--|---|---|

- Tanaman sayuran serta tanaman perkebunan yaitu kelapa dalam yang bersumber dari dana APBN bantuan Paket A dan paket B, serta bantuan jagung dan kakao dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Tanaman warga tersebut diserang hama babi, kera dan tikus, sehingga hasil panen warga tidak maksimal, ada yang gagal panen. Sementara bantuan jadup sudah habis. Warga

minta lahan pekarangan dan lahan usaha I nya di babi, agar dimasukan di anggaran APBN/APBD.

- Transmigran Padang Tarok SP.1 mohon tambahan jadup, agar Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengalokasikan dananya
- Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, perlu dibangun gedung SD di lokasi Padang Tarok SP.2 Kabupaten sijunjung dan memfasilitasi guru, minimal memanfaatkan balai Desa untuk sementara mengingat jika bergabung dengan SD terdekat jarak tempuhnya ± 11 KM.
- Perlu dibangun gedung TK/PAUD dan memfasilitasi guru TK/PAUD di lokasi transmigrasi, karena pendidikan anak usia dini sangat diperlukan, pembentukan aklak dan mental anak.
- Mengingat belum adanya bangunan Masjid/ Musholla di lokasi Transmigrasi, diharapkan adanya bangunan sehingga warga trans migrasi dapat beribadah, kerukunan antar umat beragama dapat terjamin.
- Perlu dibangun Pustu dan memfasilitasi petugas medis di lokasi transmigrasi, mengingat Poskesri dan Pustu terdekat dari lokasi jaraknya ± 11 km.
- Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha I warga transmigrasi Padang Tarok SP.1 mohon dipagar untuk mencegah tanaman warga dirusak oleh babi, agar dimasukan dian ggaran APBN atau APBD.

E. Penghargaan Nasional Yang Diterima

1) Pada tanggal 28 November 2019. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

(IPK) terbaik Tahun 2019 pada bidang “**Hubungan Industrial**”.



2) Penghargaan Paramakarya pada 2 (dua) perusahaan yaitu Kunango Jantan dan Aesya

Collection.



BAB III.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Sumatera Barat sbb :

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Ketenaga Kerjaan RI
 - DIPA No.SP DIPA-026.05.3.089022/2019 tanggal 5 Desember 2018
 - DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2019 tanggal 5 Desember 2018
 - DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2019 tanggal 5 Desember 2018
 - DIPA No.SP DIPA-026.04.3.089079/2019 tanggal 5 Desember 2018
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - DIPA No.SP DIPA-067.07.4.350146/2019 tanggal 5 Desember 2018

□ DIPA No.SP DIPA-067.08.4.350145/2019 tanggal 5 Desember 2018

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang melaksanakan

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan pelaksanaanya.

Pada Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh anggaran APBN dalam bentuk dana Dekonsentrasi dari 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp. 13.694.264.000,- dan realisasi sebesar Rp.13.414.793.284 (97,96%) yang terdiri dari 6 (enam) program , dengan rincian program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial;
- Konsolidasi pelaksanaan dan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Pengelolaan persyatan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis layanan ditjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja.

b. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan

- Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
- Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
- Peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- Peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesalahan kerja.

- c. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas;
 - Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas;
 - Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja;
 - Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri binalattas;
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas binalitas.

- d. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi;
 - Pembangunan permukiman transmigrasi;
 - Penyediaan tanah transmigrasi.

- e. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - Peningkatan pengembangan pasar kerja;
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pembinaan penempatan tenaga kerja

- f. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen pengembangan kawasan transmigrasi;
 - Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi;
 - Pengembangan usaha transmigrasi;
 - Pengembangan sosial budaya transmigrasi;
 - Pelayanan pertanahan transmigrasi.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- a) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran

sebesar Rp.931.648.000,-, terealisasi sebesar Rp.901.555.770,- (96,77%) dan Fisik 97,98% Dengan output kegiatan :

- Pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negoisasi;
- Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan perjanjian kerja bersama;
- Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial;
- Perjanjian bersama (PB) yang dihasilkan oleh mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI;
- Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal ditjen PHI dan Jamsos;

b) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.570.000,- teralisasi sebesar Rp.1.207.558.341,- (98,13%), fisik 100% Dengan output kegiatan :

- Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
- Pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma perlindungan tenaga kerja perempuan;
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang kontruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran;
- Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan;
- Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Ditjen Biwasnaker dan K3;
- Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal;
- Layanan perkantoran.

c) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 8.103.899.000,- teralisasi sebesar Rp. 7.996.927.533,- (98,68 %) , fisik 100%. Dengan output kegiatan

- Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi;
- Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri;

- Partisipasi Indonesia pada ajang kompetisi keterampilan se-Asean dan WorldSkills;
- Peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri;
- Perusahaan yang melaksanakan magang dalam negeri;
- Peningkatan produktivitas;
- Unit usaha yang dibangun;
- Calon wirausaha baru yang dilatih.

d) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp. 431.311.000,- teralisasi sebesar Rp.402.605.900 (93,34 %), fisik 100 %. Dengan output kegiatan

- Pembinaan pelayanan IPK pemerintah yang memenuhi standar;
- Layanan dukungan Manajemen Eselon I.

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa Pembangunan dan Transmigrasi RI dengan anggaran sebesar Rp.946.600.000,- teralisasi sebesar Rp.927.668.000,- (98,00%) dan fisik 100% Dengan output kegiatan :

- Layanan dukungan Manajemen Eselon I; Layanan perkantoran;
- Satuan pemukiman yang sarana dan prasarannya dibangun, fungsional di kawasan transmigrasi;
- Luasan tanah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL;
- Luasan tanah yang difasilitasi untuk pencadangan transmigrasi.

f) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.050.236.000,- teralisasi sebesar Rp. 1.978.477.740 (96,50 %), fisik 100%. Dengan output kegiatan :

- Layanan dukungan Manajemen Eselon I;
- Laporan/kesepakatan koordinasi dengan KL dan Pemda dalam rangka pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
- Kawasan Transmigrasi yang ditingkatkan produktivitas lahannya dan dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri;

- Kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya;
- Bidang tanah yang difasilitasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran.

6. Permasalahan Dan Solusi

1. Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - a. Areal berada di luar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
2. Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.
3. Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan social budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Urusan Pemerintahan Yang diTugaspembantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten Kota.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten sbb :

- DIPA No.SP DIPA-026.05.3.089022/2019 tanggal 5 Desember 2018
- DIPA No.SP DIPA-026.08.3.089025/2019 tanggal 5 Desember 2018
- DIPA No.SP DIPA-026.13.3.089026/2019 tanggal 5 Desember 2018
- DIPA No.SP DIPA-026.04.3.089079/2019 tanggal 5 Desember 2018

3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

a) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sumber dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan anggaran sebesar Rp.931.648.000,-, terealisasi sebesar Rp.901.555.770,- (96,77%) dan Fisik

97,98% Dengan output kegiatan :

- Pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi;
- Pengusaha dan SP/SB yang mendapatkan bimbingan teknis pembuatan perjanjian kerja bersama;
- Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai program jaminan sosial;
- Perjanjian bersama (PB) yang dihasilkan oleh mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI;
- Pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan pegawai atas pelayanan internal ditjen PHI dan Jamsos;

4. Sarana dan Prasarana

Aset tetap

| Jenis | Nilai | Lengkap |
|-------------|-------------------|---------|
| a. Tanah | 48.718.958.773,33 | Lengkap |
| b. Mesin | 16.107.965.547,09 | Lengkap |
| c. Bangunan | 12.892.579.816,49 | Lengkap |
| Jumlah | 77.719.504.136,91 | |

Aset lainnya

| Jenis | Nilai | Lengkap |
|-----------------------|----------------|---------|
| Aset tidak bermanfaat | 757.249.582,18 | Lengkap |
| Jumlah | | |